Pelayanan Kesehatan sebagai Bentuk Tanggung Jawab

Negara Hukum yang Berdemokrasi

Sheren Mega Fitri Ananda

IIK STRADA Indonesia

sherengafida@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang, kesehatan merupakan pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik merupakan bentuk tanggungjawab negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdemokrasi.

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Negara Hukum, Demokrasi

1. Latar Belakang

Sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang, karena kesehatan seseorang sangat menunjang aktivitas kesehariannya (Isriawaty 2015). Pembangunan kesehatan dalam sebuah negara merupakan sebuah investasi yang sangat baik karena jika suatu bangsa warga terjaga kesetannya dengan baik maka, bangsa tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang lebih optimal dalam pembangunan. Salah satu usaha peningkatan kesehatan pada masyarakat dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayani.

Suatu alat atau tempat tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat disebut fasilitas kesehatan (Notoatmodjo, 2010). Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan menyangkut penyebaran dan akses atau kejangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Dalam pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan manfaat dan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin (Afandi 2008). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pada kenyataannya kondisi derajat kesehatan masyarakat masih tergolong rendah terbukti dengan masih banyak ditemuinya masalah kesehatan di masyarakat. Penyebab terjadinya masalah kesehatan salah satunya karena biaya kesehatan yang mahal membuat masyarakat enggan untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi (Asshiddiqie 2005).

Sebagai negara hukum yang berdemokrasi Indonesia menganut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat (Handoyo 2009). Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat (Bangun 2008). Berdasarkan uraian tersebut, negara Indonesia dengan negara hukum yang menanut prinsip demokrasi dituntut untuk bertanggungjawab dalam mewujudkannya dibidang pelayanan kesehatan.

2. Kasus/Masalah

Bagaimana tanggungjawab negara hukum yang berdemokrasi dalam pelayanan kesehatan?

3. Tinjauan Pustaka

3.1. Pelayanan Kesehatan

3.1.1. Pengertian dan pengaturan Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. "Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan" (Wila Chandrawila, 2001).

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1 ayat (11) Ketentuan Umum yang berbunyi: "Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Hendrojono Soewono juga menyebutkan bahwa yang dimaksud "pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau berjasama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok/masyarakat".

3.1.2. Syarat-syarat Pelayanan Kesehatan

Syarat pokok pelayanan kesehatan yaitu menurut (Azwar, 1996) :

- a. Tersedia dan berkesinambungan (*available and continuous*) Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan adalah harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continuous*), artinya semua jenis pelayanan

kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit untuk ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat pada setiap dibutuhkan.

b. Dapat diterima dan wajar (acceptable and appropriate) Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik.

c. Mudah dicapai (accessible) Pengertian ketercapaian adalah dari sudut lokasi. Pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan dianggap tidak baik apabila terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan tidak ditemukan di pedesaan.

d. Mudah dijangkau (affordable) Pengertian keterjangkauan terutama dari sudut biaya. Biaya pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e. Bermutu (quality) Mutu menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

3.1.3. Standar Pelayanan kesehatan

Standar pelayanan kesehatan terdiri dari 3 (tiga) komponen menurut (Bustami,2011) yang harus dimiliki pelayanan kesehatan. Yaitu adanya masukan (input, disebut juga structure), proses, dan hasil (outcome) :

- A. Masukan (Input) Masukan (Input) yang dimaksud di sini adalah sarana fisik, perlengkapan dan peralatan, organisasi dan manajemen keuangan, serta sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di puskesmas dan rumah sakit. Beberapa aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam hal ini adalah kejujuran, efektivitas, serta kuantitas dan kualitas dari masukan yang ada. Pelayanan kesehatan yang baik memerlukan dukungan input yang bermutu yaitu sumber daya yang ada perlu diorganisasikan dan dikelola sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur kerja yang berlaku dalam hal ini adalah memiliki tenaga kesehatan yang baik yang bekerja secara profesional.
- B. Proses yang Dilakukan Proses adalah semua kegiatan atau aktivitas dari seluruh karyawan dan tenaga profesi dalam interaksinya dengan pelanggan. Baik tidaknya proses yang dilakukan di puskesmas atau rumah sakit dapat diukur dari:
 - 1) Relevan atau tidaknya proses yang diterima oleh pelanggan dalam hal ini pasien;
 - 2) Efektif atau tidaknya proses yang dilakukan;
 - 3) Dan mutu proses yang dilakukan. Variable proses merupakan pendekatan langsung terhadap pelayanan kesehatan. Semakin patuh petugas atau tenaga kesehatan terhadap standar pelayanan kesehatan, maka semakin baik pula standar pelayanan kesehatan yang dimiliki.
- C. Hasil yang dicapai Hasil yang dicapai disini adalah merupakan tindak lanjut dari pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien, apakah pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada atau tidak dapat dilihat dari hasil pengobatan yang diberikan kepada pasien dan apakah pasien tersebut dengan melihat dari kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan tersebut.

3.2. Negara Hukum

Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikemukakan Albert Van Dicey¹⁷ salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku mengemukakan, ada tiga (3) unsur utama the rule of law, yakni;

1. Supremacy of law adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
2. Equality before the law ; kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara
3. Constitution based on individual right; konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakkan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

3.3. Demokrasi

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Pengertian demokrasi secara sempit di kemukakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa “ demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya.

4. Pembahasan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Menurut (Utrecht 2001), prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundangundangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Handoyo 2015).

Konsep negara hukum yang demokratis mengandung ciri-ciri yang kompleks mengenai; bahwa negara hukum itu memiliki ciri utama (Simamora 2014). Gambaran ini diadopsi dari prinsip dasar ilmu politik tentang ciri negara hukum yang secara etis tetap relevan, yakni: kekuasaannya harus dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak asasi manusia, serta menurut pembagian kekuasaan

(MagnisSuseno 2001). Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. tujuan negara hukum ialah pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya, termasuk dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ridwan 2009). Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, termasuk dalam bidang kesehatan (Dayanto 2013).

Kehadiran Negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap warga negara. Salah satu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjalankan fungsinya sebagai manusia itu sendiri. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjalankan fungsinya sebagai manusia itu sendiri. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan bidang ini diarahkan pada pencapaian derajat kesehatan yang optimal pada seluruh lapisan masyarakat. Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi akan memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang baik pula, begitu pula sebaliknya. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.

5. Kesimpulan

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Pelayanan kesehatan diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik merupakan bentuk tanggungjawab negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdemokrasi.

6. Daftar Pustaka

Abdul Aziz Hakim, Op.Cit, h. 8

Afandi, Dedi. 2008. —Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM.|| *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2(1).

Ananda, S. M. F. (2021). Peran BPJS sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan.

Asshiddiqie, Jimly. 2003. —Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945.|| *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*: 14–18.

Attoriq, S., & Sodik, M. A. (2018). Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan Di Lahan Praktik.

Azwar, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Ed 3, Jakarta : Binarupa Aksara. Hal 16.

Bangun, Zakaria. 2008. *Demokrasi Dan Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.

Bustami, 2011, Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan, Erlangga, Jakarta, Hal. 16-17.

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi."* Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Hendrojono, Soewono, 2007, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik, Surabaya, Srikandi. Hal 100-101.

Isriawaty, Fheriyal Sri. 2015. —Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik.

Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 293.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ridwan, Juniarso. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Simamora, Janpatar. 2014. —Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia.|| *Jurnal Dinamika Hukum* 14(3).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, Hal . 35.